

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan dan Saran Kebijakan

5.1.1. Kesimpulan

1. Hasil penelitian membuktikan kebenaran hipotesis, dimana semua variabel yang mewakili masing-masing karakteristik determinan kemiskinan yaitu karakteristik individu, karakteristik aksesibilitas dan rumah tangga, dan karakteristik makro secara nyata signifikan menurunkan tingkat kemiskinan.
2. Perbedaan karakteristik individu, infrastruktur (aksesibilitas) dan rumah tangga, dan karakteristik makro antar propinsi telah memberikan pengaruh individu yang berbeda terhadap tingkat kemiskinan masing-masing propinsi.
3. Berdasarkan analisis deskriptif karakteristik individu diketahui bahwa Kawasan Timur Indonesia khususnya propinsi NTB, NTT, dan Irian Jaya memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah dibandingkan propinsi lainnya.
4. Sedangkan berdasarkan analisis deskriptif karakteristik infrastruktur (aksesibilitas) diketahui bahwa propinsi yang paling lemah infrastruktur listriknya adalah propinsi NTT, Lampung, Jambi, Sultra dan Irian Jaya. Sedangkan propinsi yang sangat lemah dalam sarana penyediaan air bersih adalah propinsi Kalbar, Kalteng, Bengkulu, Jambi, Riau, dan Irian Jaya
5. Propinsi yang memiliki layanan puskesmas keliling yang paling rendah adalah propinsi Irian Jaya, Kaltim, dan Kalteng.
6. Adapun propinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah adalah propinsi NAD dan Irian Jaya.
7. Sedangkan dari hasil regresi diketahui bahwa faktor determinan kemiskinan karakteristik individu baik variabel tingkat melek huruf

(LR) maupun variabel rata-rata lama sekolah (RLS) terbukti mengurangi semua indikator kemiskinan.

8. Adapun karakteristik komunitas dan rumah tangga khususnya variabel prosentase rumah tangga yang memiliki akses listrik (RTAL) terbukti mengurangi tingkat kemiskinan absolut. Sedangkan variabel prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (RTAB) terbukti mengurangi tingkat kesenjangan dan keparahan kemiskinan. Adapun variabel rasio jumlah Puskesmas Keliling terhadap luas wilayah (RPKN) hanya terbukti mengurangi tingkat kemiskinan absolut.
9. Pada faktor karakteristik makro atau lingkungan ekonomi diketahui bahwa variabel pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbukti menurunkan tingkat kemiskinan absolut dan tingkat keparahan kemiskinan. Sedangkan variabel rasio pertumbuhan sektor pertanian terhadap pertumbuhan PDRB terbukti menurunkan semua indikator kemiskinan. Adapun variabel rasio pertumbuhan sektor industri terhadap pertumbuhan PDRB terbukti menurunkan tingkat kemiskinan absolut.

5.1.2. Saran Kebijakan

1. Kebijakan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang *pro poor* perlu diarahkan terutama terhadap daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah diantaranya adalah propinsi NAD dan Irian Jaya.
2. Meningkatkan infrastruktur daerah khususnya pembangunan sarana dan prasarana listrik dengan mengutamakan pemanfaatan potensi lokal yang ada diantaranya melalui pengembangan listrik sumber panas bumi, tenaga arus laut (*Cobold*), angin, air atau udara. Hal ini ditujukan terutama terhadap daerah-daerah yang masih minim akses listriknya seperti propinsi NTT, Lampung, Jambi, Sultra dan Irian Jaya.

3. Kebijakan Pemerintah meningkatkan akses pendidikan masyarakat seperti melalui Program Wajib Belajar 9 tahun, BOS dan semisalnya perlu terus dilakukan terutama terhadap daerah-daerah dengan tingkat pendidikan penduduk yang relatif rendah dibandingkan propinsi lainnya seperti propinsi NTB, NTT, dan Irian Jaya.
4. Meningkatkan layanan kesehatan Puskesmas Keliling (Mobil maupun Perahu) yang bermutu, murah dan terjangkau terutama di propinsi Irian Jaya, Kaltim, dan Kalteng.
5. Memberikan jaminan akses masyarakat miskin ke air bersih dan meningkatkan pengelolaan sumber daya air terutama di propinsi propinsi Kalbar, Kalteng, Bengkulu, Jambi, Riau, dan Irian Jaya

